

## BAB IX

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja Pemerintah Kota Ambon bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, 2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, 3) memfokuskan padahal-hal utama, penting dan merupakan prioritas daerah serta 4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2011-2016 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain: Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan parameter "Peningkatan Kualitas Manusia" dan Indikatornya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel 9.1. berikut :

**TABEL 9.1**  
**INDIKATOR KINERJA DAERAH**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
<b>I.1.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									
1	Pertumbuhan PDRB	%	6.65	6,77	6.25 - 6.35	6.35 - 6.50	6.50 - 6.65	6.65 - 6.80	6.80 - 7.00	7.00
2	Pendapatan Per Kapita	Rp.	4.913.427	5.505.192	5.576.728	6.260.937	6.392.791	6.661.948	6.954.921	6.954.921
3	Angka Kemiskinan	%	7.67	6.75 - 7.00	6.00 - 6.75	5.50 - 6.00	5.00 - 6.50	4.50 - 5.00	4.00 - 4.50	4.00
4	Laju Inflasi	%	8,87	8.00 - 7.00	6.00 - 7.00	5.00 - 6.00	4.50 - 5.00	4.00 - 4.50	3.00 - 4.00	3.00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	15.62	10.00 - 12.50	9.50 - 10.00	9.00 - 9.50	8.50 - 9.00	8.00 - 8.50	7.50 - 8.00	7.50
<b>I.2.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>									
	APK PAUD	%	38.77	39.09	40.25	41.40	42.55	43.70	44.86	44.86
1	Penduduk yang berusia >15 thn melek huruf (tidak buta aksara)	%	99.81	99.81	99.87	99.89	99.91	99.94	99.97	99.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.05	0.03	0	0	0	0	0	0
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.03	0.02	0.01	0	0	0	0	0
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	%	0.62	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.05
5	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	%	2.09	1.74	1.39	1.04	0.69	0.54	0.15	0.15
6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.86	99.87	99.88	99.89	99.9	99.91	99.92	99.92
8	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	%	99.94	99.96	99.97	99.97	99.98	99.99	99.99	99.99
9	Angka Kelulusan (AL) SMK	%	99.92	99.93	99.94	99.95	99.96	99.97	99.98	99.98
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.18	11.23	11.28	11.33	11.4	11.5	11.6	11.6
<b>1.3</b>	<b>KESEHATAN</b>									
1	Angka Kematian Ibu Melahirkan	/100.000 KLH	49	27	26	25	24	23	22	22
2	Angka Kematian Bayi	/1.000 KLH	6	3.2	3.1	3	2.9	2.8	2.7	2.7
3	Angka Kematian Balita	/1.000 KLH	7.7	4.2	4	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2
4	Kasus Gizi Buruk	%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kasus Gizi Kurang	%	3.55	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0
6	Desa Siaga Aktif	%	20	25	30	40	45	55	60	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	KB Aktif	%	64.3	66	68	70	72	74	76	76
8	Air Bersih yang memenuhi syarat	%	65	65	70	70	75	80	90	90
11	UCI Desa	%	90	94	96	100	100	100	100	100
12	Usia Harapan Hidup	tahun	73.01	73.15	73.25	73.35	73.45	73.6	73.75	73.75
<b>1.4</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,56	65,39	68.00	71.00	74.00	80.00	85.00	85.00
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
	<b>Pendidikan</b>									
1	Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100.72	101.22	101.72	102.22	102.72	103.22	103.72	103.72
2	Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	94.15	94.65	95.15	95.65	96.15	96.65	97.15	97.15
3	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	77.92	78.42	78.92	79.42	79.92	80.42	80.92	80.92
4	Ratio Guru : Murid SD/MI		1 : 15	1 : 15	1 : 16	1 : 17	1 : 17	1 : 18	1 : 19	1 : 19
5	Ratio Guru : Murid SMP/MTs		1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1 : 16
6	Ratio Guru : Murid SMA/MA		1 : 14	1 : 13	1 : 14	1 : 15	1 : 16	1 : 17	1 : 18	1 : 18
7	Ratio Sekolah : Siswa SD/MI		1 : 199	1 : 199	1 : 199	1 : 199	1 : 199	1 : 199	1 : 199	1 : 199
8	Ratio Sekolah : Siswa SMP/MTs		1 : 335	1 : 329	1 : 320	1 : 310	1 : 300	1 : 290	1 : 275	1 : 275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ratio Sekolah : Siswa SMA/MA		1 : 426	1 : 410	1 : 400	1 : 385	1 : 370	1 : 360	1 : 350	1 : 350
	<b>Kesehatan</b>									
	ratio posyandu per satuan balita		1 : 122,93	1 : 120	1 : 110	1 : 100	1 : 90	1 : 80	1 : 70	1 : 70
	gizi buruk		0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Puskesmas	Buah	22	22	22	22	25	25	25	25
	Jumlah Rumah Sakit	Buah	9	9	9	9	10	10	11	11
	<b>Pekerjaan Umum</b>									
	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%		82.57	85.00	87.00	90.00	92.00	95.00	95.00
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
<b>III.1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									
	Jumlah Kantor Bank	unit	43	46	48	50	50	50	50	50
	Produksi Listrik	KWh	233,052,745	233,052,745	233,052,745	233,052,745	233,052,745	233,052,745	233,052,745	233,052,745
<b>III</b>	<b>Pariwisata</b>									
	Banyaknya Hotel	Unit	54	54	54	54	54	54	54	54
	Angka Kunjungan Wisata	orang	5.959	6.000	6.250	6.500	6.750	7.000	7.250	7.250
	Objek Wisata	Lokasi	69	69	69	69	69	69	69	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>II.2</b>	<b>LINGKUNGAN</b>									
1	Kawasan Kumuh	%	96.38 Ha	75	50	30	20	15	10	10
2	Ruang Terbuka Hijau	%	11	15	20	25	28	30	32	32
<b>II.3</b>	<b>KOPERASI</b>									
1	Terwujudnya koperasi berkualitas	Unit	100	125	150	175	200	225	250	250
2	Terwujudnya usaha mikro kecil yang tangguh dan mandiri	UMK	Belum teridentifikasi	-	65	130	205	280	365	365
3	Terwujudnya usaha Menengah yang berdaya saing	UM	Belum teridentifikasi	-	3	6	9	12	15	15
4	Terbentuknya koperasi Wanita PKK baru di setiap Negeri/Kelurahan	Unit	-	-	15	30	50	50	50	50
5	Terwujudnya sarjana wirausaha baru	Orang	Belum teridentifikasi	-	45	90	142	194	255	255
6	Meningkatnya penyerapat tenaga kerja di sektor KUMKM sebesar 5 % per tahun dari kondisi tahun 2010	Orang	8,022	8,423	8,844	9,286	9,751	10,238	10,750	10,750
<b>II.4</b>	<b>KEHUTANAN</b>									
1	Luas Lahan Kritis	Ha	9.182,24	8.8784,02	8.718,97	8.483,97	8.207,02	7.919,32	7.643,32	7.643,32